

Policygraphy: Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Larangan Mudik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Mita Widyastuti¹, Fadhilah², Abdul Muis³

Email: mitawidyastuti2905@gmail.com, fadhilah.mb@gmail.com, abdulmuis@gmail.com
(Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam '45')

ABSTRAKS

Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi, baik kebijakan yang terkait langsung dengan kesehatan, kebijakan social untuk mengatasi daya beli masyarakat yang merosot maupun kebijakan insentif ekonomi. Berbagai analisa dilakukan para ahli terhadap isi kebijakan, implementasinya dan evaluasi awal dari kebijakan-kebijakan tersebut mengingat sampai hampir 1 tahun masa pandemi melanda Indonesia kasus-kasus infeksi Covid-19 belum menunjukkan penurunan. Analisa dari kacamata masyarakat sebagai kelompok sasaran belum banyak dilakukan, oleh karena itu penelitian ini menjadi penting. Penelitian ini menggambarkan persepsi dan respon masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dengan fokus kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Asumsinya persepsi dan respon masyarakat ekuivalen dengan responsivitas kebijakan dan tindakan pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam pada informan. Komunikasi publik pemerintah yang buruk, kelembagaan dan konsep penanganan pandemi yang berubah-ubah demikian juga serta inkonsistensi pemerintah mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan larangan mudik 2021..

Key words: Policygrafis, penanganan pandemi, respon masyarakat

1. Pendahuluan

Virus Corona dilaporkan pertama kali muncul pada Desember 2019. Virus yang menyebabkan gangguan pernafasan itu kini menyebar ke hampir semua negara. Tiga bulan setelah dilaporkan pertama di Wuhan, China, virus itu telah menyebar di Indonesia. Melihat sebaran virus corona, organisasi kesehatan dunia (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri, dilaporkan adanya kasus Covid-19 setelah presiden mengumumkan adanya pasien 1 dan 2 pada 2 Maret 2020. Sebagai upaya menghentikan laju penyebaran virus pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya masyarakat diminta berdiam di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah.

Berbeda dengan negara lain yang melakukan kebijakan karantina wilayah (Cina, Italia, Iran, Malaysia, dsb). Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih

mudahnya disebut dengan PSBB. Dengan pembatasan social tersebut diharapkan terjadi penurunan interaksi masyarakat yang akan mengurangi penularan atau ineksi virus yang terjadi dari satu orang ke orang lain. Kebijakan ini menimbulkan beberapa dampak negatif karena dunia usaha harus mengurangi aktifitasnya yang berujung pada PHK pekerja, proses pendidikan harus dilakukan secara daring yang membuat anak dan orang tua stress karena ketidak siapan menghadapi situasi yang berubah secara mendadak dan banyak perusahaan transportasi gulung tikar karena menurunnya jumlah penumpang. Kesulitan hidup masyarakat ditambah dengan ketakutan akan terjangkit Covid-19 telah memberi kontribusi pada naiknya kriminalitas dan masalah social di masyarakat.

Kondisi pandemic dapat diibaratkan sebuah perang atau krisis, situasinya dapat berubah setiap saat, antisipasi dan pengambilan keputusan yang salah dapat menjauhkan peluang kita untuk memenangkan pertempuran. Edward (1980) menyatakan kebijakan pada masa krisis merupakan kebijakan yang masuk kategori sulit untuk diimplementasikan dan memiliki peluang gagal. Fakta bahwa pandemic Covid-19 ini musuhnya tidak kelihatan tetapi dampak yang dirasakan sangat nyata, virus ini memiliki daya rusak tidak hanya bagi tubuh manusia tetapi juga bagi ekonomi, politik, pendidikan dan semua dimensi kehidupan. Dalam mengatasi krisis tentu dibutuhkan kepemimpinan yang dapat membuat *dream team*, yang mampu membaca situasi dan memanfaatkan sumberdaya yang terbatas dengan hasil yang maksimal.

Le dkk (2021) bahwa keberhasilan Vietnam dalam mengatasi pandemic Covid-19 merupakan harmonisasi dari berbagai faktor dan aktor utamanya adalah faktor kebijakan. Pemerintah Vietnam memiliki system kebijakan yang mengedepankan kesegeraan/cepat, proaktif dan efektif untuk dijalankan dalam setiap level pemerintahan. Sistem pemerintahan yang sentralistis mendukung terwujudnya implementasi kebijakan yang terpadu dan terkoordinir dengan baik.

Pengalaman Cina sebagai daerah pertama kasus Covid-19 muncul bahwa kepemimpinan kolaboratif mampu meningkatkan aksi bersama dalam menangkal meluasnya penularan Covid-19. Penelitian Shu & Wang (2021) bahwa kepemimpinan kolaboratif efektif dalam mensosialisasikan social distancing, mengatasi kepanikan masyarakat, menjaga pasokan kebutuhan rumah tangga pada masa awal *lockdown* sehingga penularan dapat dihindari. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang disorot dalam penanganan pandemic Covid di Indonseia, studi awal yang dilakukan oleh Fisipol UGM bahwa untuk menangani krisis pandemic ini dibutuhkan strong leadership yang cepat tanggap terhadap

situasi, bagaimana melahirkan kebijakan dengan arah yang jelas, sehingga mobilisasi sumberdaya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Mas'udi & Winanti, 2020).

Pada saat negara lain sudah dapat memulai aktifitas secara normal atau melonggarkan aturan, di Indonesia jumlah pasien Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kebijakan yang kurang berbasis data (*evidence based policy*), tidak konsisten, implementasi yang kurang siap dan lemah dalam koordinasi, informasi kebijakan yang kurang jelas dan simpang siur menimbulkan persepsi negative di masyarakat berakibat ketidakpatuhan masyarakat pada protocol yang dikeluarkan pemerintah. Pencegahan dengan melakukan 3M (cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak) seringkali tidak dipatuhi. Kampanye yang dilakukan oleh publik figure maupun para ahli (tenaga medis) mendapatkan respon yang kurang baik karena masyarakat sering melihat kontras yang dilakukan para pejabat dan public figure yang mempertontonkan kekurangpatuhan. Berbagai kebijakan telah dilakukan dan bongkar pasang personil/pejabat maupun perbaikan dalam pengorganisasian telah dilakukan. Terakhir pemerintah memilih jalan vaksinasi massal yang juga diwarnai perdebatan.

2. Landasan Teori

a. Kebijakan Publik, Formulasi ke Implementasi

Pada awal perkembangan studi kebijakan public para ilmuwan berkeyakinan bahwa formulasi kebijakan merupakan hal yang paling krusial dalam kebijakan public, sebuah kebijakan dinilai bagus kalau sudah melewati tahapan yang benar. Keyakinan tersebut dibantah oleh beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang paling krusial, konsep-konsep kebijakan yang bagus tidak akan memiliki arti apa-apa atau tidak memberi dampak apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Kebijakan hanya menjadi dokumen atau deretan konsep-konsep ideal dan tidak memberi perubahan pada masyarakat.

Sebuah masalah public sampai menjadi sebuah kebijakan harus melewati proses yang panjang. Pada tahap agenda setting masyarakat dan pembuat kebijakan harus mampu melihat dan mengidentifikasi masalah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah, jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada fase-fase berikutnya. Masalah public harus diperjuangkan untuk dapat masuk ke agenda pemerintah, diperlukan peran serta masyarakat dan para actor kebijakan untuk berjuang agar masalah yang dibawa atau diusulkan memang perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan bersama dan mendorong masuk dalam agenda pemerintah. Cobb dan Elder (dalam Islami, 2004) mengemukakan 3 syarat agar issue kebijakan dapat masuk dalam agenda sistemik, yaitu: (1) isu itu memperoleh

perhatian yang luas atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat; (2) adanya persepsi dan pandangan/pendapat public yang luas bahwa beberapa Tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu; dan (3) adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab yang sah dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya. Setelah masuk pada agenda pemerintah tidak selalu serta merta berakhir pada kebijakan, kemampuan pemerintah dan legislative untuk membahas membutuhkan lobby-lobby para actor kebijakan, demikian pula dinamika masyarakat yang cepat mendorong lahirnya masalah-masalah baru yang lebih urgent.

Kualitas kebijakan ditentukan oleh sejauh mana alasan yang mendasari perumusan masalah kebijakan dan alternatif solusi cukup masuk akal (*plausible*) (Dunn, 1994). Pendapat Dunn tersebut menjadikan data atau informasi menjadi dasar yang penting dalam penyusunan kebijakan atau yang dikenal dengan *evidence based policy*. Pengambilan keputusan kebijakan harus didasarkan pada data atau informasi yang akurat yang berasal dari lapangan (masyarakat). Dengan bantuan teknologi informasi penelusuran atau pendataan lebih mudah dilakukan, efisien dan cepat. Tinggal pemangku kepentingan mau dan mampu memanfaatkan teknologi yang tersedia apa tidak.

Implementasi merupakan tahapan yang paling menentukan apakah sebuah kebijakan memberikan perubahan kearah yang lebih baik pada masyarakat. Bisa jadi sebuah kebijakan setelah diimplementasikan membuahkan hal-hal yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai yang diprediksikan. Hal ini terjadi karena beberapa hal, pertama rumusan masalahnya yang salah, kedua, alasan atau solusi pemecahan tidak didukung oleh sebuah hubungan kasualitas yang masuk akal (*plausible*), keempat, proses dalam formulasi yang tidak mulus (menyisakan konflik yang tidak terselesaikan) dan kelima, penyelenggara/pelaksana tidak kredibel dan menimbulkan anti pati/keengganan pada masyarakat. Hogwood dan Gun dalam Wahab (1997:48), membagi kegagalan/ketidakberhasilan implementasi dalam dua kategori, yaitu:

a. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan)

Mengandung arti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tidak mau bekerjasama atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau mungkin permasalahan yang dianggap di luar jangkauan kekuasaannya.

b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil)

Terjadi masalah suatu kebijakan yang tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternalnya ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba

terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak ataupun hasil akhir yang dikehendaki

Ketidakberhasilan kebijakan sebenarnya dapat diprediksi dari awal yaitu pada saat proses agenda setting yang dilanjut dengan formulasi, keterlambatan menangkap dan memahami isu public dari para actor kebijakan dipahami sebagai adanya inkompetensi pengambil keputusan. Hal ini akan berdampak saat kebijakan tersebut diimplementasikan, ketaatan kelompok sasaran pada kebijakan rendah karena adanya antipati atau kurangnya *trust* pada pelaksana atau pemerintah. Umpan balik dari kelompok sasaran harus menjadi perhatian pada pemerintah mengingat kebijakan publik dibuat dengan tujuan menyelesaikan masalah, apabila masalah tidak terselesaikan maka akan memunculkan masalah baru dan menjadi semakin kompleks.

b, Kebijakan Masa Krisis

Edward (1980) mengidentifikasi beberapa jenis kebijakan yang mengalami berbagai kendala dalam implementasinya, antara lain: *new policies*, *crisis policies*, *decentralize policies*, *judicial policies*, *complex policies* dan *controvercial policies*. Kesulitan-kesulitan tersebut berkaitan dengan jaringan komunikasi, sumberdaya, ketidakkonsistenan tujuan dan program, dinamika lingkungan, perbedaan yuridiksi, perbedaan kondisi wilayah, kompleksitas tujuan dan struktur pelaksanaannya dan sebagainya. Kendala implementasi tersebut terangkum dalam table dibawah ini.

Tabel 1.1.
Faktor-faktor Hambatan Implementasi

| Indikator | New Policies | Crisis Policies | Decentralize Policies | Judicial Policies | Complex Policies | Controvercial Policies |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Konsistensi Kebijakan/Program | v | | | v | v | v |
| Jaringan komunikasi | v | v | v | | v | v |
| Sumberdaya | v | v | | | | |
| Informasi | | v | | | v | v |
| Koordinasi | | | v | v | v | |
| Pengawasan | | | v | | v | |

Sumber: Dirangkum peneliti

Berdasarkan penjelasan Edward maka komunikasi merupakan factor yang krusial disemua jenis kebijakan. Komunikasi pada masa krisis tentunya berbeda pada masa normal. Menurut Lee (2008 dalam Pinkowski (ed)) terdapat dua factor kunci adanya perbedaan itu: pertama, *public relations programs by government agencies (or other organizations, for that matter) cover a panoply of activities, audiences, and forms of communication*; kedua, *at the beginning of an*

emergency, external communication is sometimes the only or fastest way to communicate internally, whether within an organization or throughout a network of agencies.

Komunikasi public yang salah justru dapat menciptakan situasi krisis semakin memburuk. Kesalahan dalam menyampaikan pesan dapat menimbulkan penerimaan pesan yang salah dan menimbulkan reaksi atau umpan balik negative. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menyampaikan pesan. Lee (2008) menyatakan 4 prinsip utama komunikasi pada masa krisis, yaitu cerdas bermedia, kredibilitas, akses dan monitoring. Cara menyampaikan, kemudahan dipahami dan kejelasan menjadi kunci. Demikian juga informasi yang akurat dan konsisten menjadi ukuran kredibilitas. Pertimbangan akses masyarakat terhadap informasi menjadi hal yang perlu diperhatikan, media apa yang paling luas dan gampang dijangkau masyarakat, TV apa radio atau keduanya saling melengkapi. Dan, informasi yang disampaikan harus terus menerus dimonitor untuk mengetahui efektifitasnya.

3. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003).

Penelitian ini memakai metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah langkah penelitian dan proses pemahaman berdasar pada sebuah metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan kualitatif, peneliti harus membuat gambaran yang sempurna, meneliti setiap kata, laporan detail dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi nyata (Creswell, 1998:15).

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan bagaimana individu mempersepsi dan memaknai peristiwa atau kejadian tersebut. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, serta peneliti menyimpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995).

Penelitian ini ingin mengetahui pandangan masyarakat (actor non negara) atas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 khususnya kebijakan larangan mudik 2021, oleh

karena itu informan penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan mudik lebaran terutama yang berdomisili di Kota/kabupaten Bekasi. Informan penelitian berjumlah 30 yang diambil secara acak, sementara data yang masuk baru berjumlah 20 informan.

4. Hasil dan Pembahasan

Mudik atau pulang kampung merupakan aktivitas migrasi yang dilakukan pada hari-hari libur tertentu yaitu pada peringatan keagamaan. Aktivitas ini timbul karena adanya migrasi orang-orang dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar, sehingga mudik merupakan peristiwa ikutan dari proses pergerakan penduduk. Peristiwa mudik ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa kita tetapi juga oleh bangsa lainnya, seperti pada saat natal atau paskah di negara-negara maju, imlek di Cina, lebaran haji di negara-negara Islam dan sebagainya. Di Indonesia lebaran Idul Fitri identic dengan mudik, pada setiap periode lebaran akan terjadi 10 jutaan lebih pergerakan manusia, baik antar kota, kota-desa, antar propinsi, antar pulau dan antar negara. Lekatnya mudik dengan lebaran terjadi karena kewajiban puasa pada bulan Ramadhan yang berujung pada hari lebaran merupakan rangkaian ujian yang harus dilakukan umat Islam dengan menjalankan puasa 1 bulan, keberhasilan menjalankan ujian Ramadhan ini dirayakan dalam bentuk berkumpul dengan keluarga besar. Bagi seorang migran mudik menjadi peristiwa yang ditunggu menjelang tibanya hari lebaran, pada pandemic yang telah melewati 2 kali lebaran maka masyarakat yang telah menahan diri untuk tidak mudik pada lebaran tahun lalu sangat berharap bisa melakukan mudik tahun ini.

Tahun sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik beberapa bulan setelah masuk pandemic. Pada waktu itu kepatuhan masyarakat relative tinggi mengingat masyarakat menghadapi sesuatu yang baru terkait pandemic covid-19. Pada saat presiden keseleo lidah saat wawancara dengan seorang *host* sebuah televisi, presiden menjelaskan pulang kampung dengan mudik itu konsep yang berbeda. Hal ini menjadi perbincangan di masyarakat maupun di media sosial dan menjadi *trending topic*. Kekeliruan tersebut menimbulkan turunnya kredibilitas presiden yang berkontribusi pada ketidakpatuhan masyarakat pada larangan mudik.

Tahun ini pemerintah untuk kedua kalinya mengeluarkan kebijakan larangan mudik dalam rangka menahan angka penuluran yang kembali tinggi di beberapa negara (India, Malaysia, Singapura dll). Seperti tahun sebelumnya, larangan mudik ini tidak berjalan dengan baik pemudik melakukan mudik dengan berbagai cara dari menghindari pos penjagaan, mencari jalan tikus, mencari jam-jam lengah penjaga dan sebagainya. Dalam wawancara terungkap bahwa semua informan menyatakan memahami kebijakan larangan

mudik yang memiliki tujuan baik dalam rangka pengendalian penyebaran/penularan Covid. Namun, dalam kenyataannya informan tetap melakukan mudik dengan beberapa penjelasan. Beberapa alasan masyarakat melakukan mudik dan tidak patuh pada kebijakan pemerintah, antara lain:

Tabel 1.2.
Alasan Mudik Informan

| No. | Alasan | Jumlah | Prosentase |
|-----|--------------------------------------|--------|------------|
| 1. | Tahun sebelumnya nggak mudik | 3 | 15 |
| 2. | Ingin ketemu orangtua & keluarga | 6 | 30 |
| 3. | Susah meninggalkan tradisi | 6 | 30 |
| 4. | Kebijakan pemerintah tidak konsisten | 3 | 15 |
| 5. | Melawan ketidakadilan | 2 | 10 |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Suber: Data setelah diolah.

Salah satu nilai mudik yang banyak menjadi alasan kuat untuk melakukan mudik adalah bertemu dengan orang tua, mereka mampu melewati rintangan dalam perjalanan mudik sebagai bentuk pengabdian pada orang tua. Mereka nekat mudik karena mengkhawatirkan mereka tidak bisa bertemu lagi dengan orang tua mengingat pandemic Covid-19 ini bisa menginfeksi siapa saja dan bisa berakhir dengan kematian, apalagi orang yang telah berusia lanjut memiliki peluang kecil untuk sembuh mengingat daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang. Adanya ketidakpastian tersebut mendorong masyarakat (pemudik) untuk bisa bertemu dan berbakti pada orang tua mengingat tren yang berkembang kemudian penderita yang berusia muda juga memiliki peluang yang besar meninggal, bertemu dengan orang tua dapat menjadi penguat bagi perantau (migran).

Secara umum informan mengetahui kebijakan larangan mudik dan dapat memahami mengapa kebijakan ini dikeluarkan pemerintah. Mereka tahu bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu merupakan upaya untuk mengatasi penularan/penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, dengan mengurangi mobilitas masyarakat pada libur lebaran diharapkan penularan dapat ditekan. Namun, masyarakat menilai bahwa kebijakan larangan mudik ini kurang tepat mengingat kebijakan larangan mudik berbarengan dengan kebijakan yang mengizinkan tempat wisata dibuka, juga mall serta tempat-tempat hiburan. Ada kesan pemerintah tidak konsisten, disatu sisi melarang mudik disisi lain membolehkan tempat-tempat wisata dan tempat hiburan lainnya, Persepsi seperti ini membuat orang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah, informan tetap melakukan mudik.

Ketidak konsistenan pemerintah juga terlihat pada kebijakan imigrasi, sampai saat ini para tenaga kerja asing dari Cina setiap hari masuk ke tanah air. Informan menilai kebijakan ini sangat tidak adil, masyarakat yang notabene pribumi dilarang bepergian, dikurung dalam rumah dan tidak boleh mudik tetapi orang asing bebas masuk ke tanah air, padahal orang-orang asing tersebut berasal dari tempat virus Covid-19 muncul. Rasa ketidakadilan ini melukai masyarakat yang akan merayakan kemenangan Ramadhan dengan berkumpul dengan keluarga dan ini sudah menjadi tradisi ratusan tahun, ini artinya pemerintah tidak menghargai masyarakatnya sendiri dan lebih melayani orang asing. Informan melakukan mudik sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil.

Persepsi public terhadap kebijakan pemerintah dapat dilihat dari makin merosotnya dukungan terhadap presiden yang pada bulan September 2020 masih di kisaran 62% dan di bulan Juli menjadi 43% (survey LSI), hal ini menandakan bahwa masyarakat selalu melakukan penilaian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan maupun dengan membandingkan dengan penanganan pandemic di negara lain yang sama-sama menghadapi situasi sulit namun sekarang sudah dapat terbebas dalam artian masyarakat sudah bebas beraktifitas, tidak memakai masker dan beberapa even penting seperti pertandingan sepak bola, pertunjukan music dan pertandingan olah raga lainnya dapat diselenggarakan. Suara-suara ketidakpuasan masyarakat juga diserukan oleh mahasiswa (BEM) dari beberapa perguruan tinggi ternama dengan membuat kritik dalam bentuk *meme*, juga tuntutan mundur presiden mulai diserukan oleh berbagai kalangan yang kritis (oposisi).

5. Penutup

Ketidakpatuhan masyarakat pada kebijakan larangan mudik merupakan manifestasi dari rentetan kebijakan penanganan Covid-19 yang tidak konsisiten, tumpang-tindih dan kurang berbasis ilmu pengetahuan dan data. Kelemahan juga dapat terlihat dari sisi implementasi, walaupun kebijakan yang diambil dinilai baik diatas kertas tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan. Koordinasi yang kurang dari instansi terkait, terlihat pimpinan mengedepankan kepentingannya dan mengabaikan kepentingan bersama. Bongkar pasang kelembagaan yang bertugas menangani pandemic membuat kecepatan bergerak menjadi terhambat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka belum dapat diprediksi Indonesia akan keluar dari pandemic Covid-19.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, beberapa data belum bisa masuk dan secara metodologi juga banyak ditemui kelemahan atau kekurangan. Situasi pandemic menjadikan penelitian lapangan tidak dapat dilakukan dengan maksimal, wawancara tidak bisa

dilakukan secara tatap muka melainkan by online sehingga kurang dapat mengungkap data secara mendalam. Masih perlu dilakukan pengayaan dengan beberapa wawancara yang lebih mendalam dan pemanfaatan data sekunder. Peneliti merekomendasikan adanya penelitian kebijakan penanganan pandemic Covid-19 dengan sudut pandang yang berbeda maupun lokus berbeda, Perlu juga dilakukan penelitian dengan metode yang dapat memotret permasalahan dengan lebih presisi.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making, An Introduction*, Fifth Edition, New York, Houghton Mifflin Company.
- Dunn, William, 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Second Edition, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
- Edward, George C III, 1980, *Implementing Public Policy*, Washinton DC, Congressional Quarterly Press.
- Islamy, Irfan, 2004, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Jorgensen, Marianne W dan Phillips, Louise J, 2007, *Analisis Wacana, Teori dan Metode*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kumorotomo, Wahyudi (ed), 2019, *Kebijakan Publik Kontemporer, Analisis Kumpulan Kasus Kebijakan di Indonesia*, Yogyakarta, IGPA Press.
- Le, Tuyet-Anh T, Vodden, Kelly, Wu, Jianghua & Atiwes, Ghada, Policy Respons of the Covid-19 Pandemic in Vietnam, *International Journal Environmental Research and Public Health*, Vol 18, Nomor 559, doi.
- Lester, James P and Stewart, Joseph, 2000, *Public Policy, An Evolutionary Approach*, Second Edition, Belmont, Wadsworth.
- Mardiyanta, Antun, 2013, Restore Public Trust Through Deliberative Public Policy Formulation, *International Journal of Administration Science and Organisation Bisnis & Birokrasi*, Vol 20, Number 1, January 2013 (9-17)
- Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edit Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pinkwonski, Jack (Ed), *Disaster Management Handbook*, Boca Raton, CRC Press.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Santoso, Purwo, dkk (ed), 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Yogyakarta,

FISIPOL UGM.

Subarsono, Agustinus (ed), 2016, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta, CPMS dan Penerbit Gava Media.

Shu, Qaunfeng & Wang, Yahua, Collaborative Leadership, Collective Action and Community Governance agaist Public Health Crisis under Uncertainty: A Case Study in Quanjingwen Community in China, *International Journal Environmental Research and Public Health*, Vol 18, Nomor 598, doi.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi 2, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.

Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus (Desain & Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.